

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar Tanah Abang merupakan pusat perdagangan dan grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 25.000 pedagang dan sekitar 13.000 kios yang tersebar di berbagai blok seperti A, B, C, F, G, pusat grosir sentral, dan pusat grosir metro (Pangestu *et al.*, 2024). Pasar ini juga memiliki 1.170 pedagang kaki lima di Blok G serta menjual berbagai produk seperti pakaian anak-anak dan dewasa, pakaian muslim, perlengkapan haji, sepatu, tas, batik, dan bahan tekstil, yang terdiri dari 70–75% produk lokal dan 20–25% impor (Pratama *et al.*, 2021). Keberagaman produk dan skala perdagangannya menjadikan Pasar Tanah Abang berperan penting bagi perekonomian Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi nasional (Syukriyah, 2019).

Setelah pandemi COVID-19, kondisi Pasar Tanah Abang mulai kembali membaik, ditandai meningkatnya jumlah pengunjung dari Jabodetabek, luar pulau Jawa, hingga mancanegara, terutama pada bulan Ramadhan 2024 ketika omzet pedagang naik 50–70% dan kunjungan mencapai sekitar 100.000 orang per hari (Natalia, 2024). Namun, berbeda dengan Blok A yang tetap ramai, Blok G mengalami penurunan pengunjung dan pendapatan akibat area belakang pasar yang sempat dirobohkan untuk revitalisasi, yang kemudian diperparah oleh dampak pandemi yang menyebabkan pasar ditutup sementara. Kondisi ini membuat banyak pedagang memilih pindah ke luar area pasar karena bagian dalam Blok G sudah jarang dilewati pengunjung (Octavia & Maullana, 2024).

Meskipun pemerintah telah merancang berbagai program pemberdayaan, proses peningkatan kapasitas pedagang masih menghadapi sejumlah hambatan sehingga tujuan pemberdayaan belum sepenuhnya tercapai. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain akses informasi pemberdayaan yang belum merata membuat beberapa pedagang belum mampu memanfaatkan program pemberdayaan yang tersedia, dukungan dan pendampingan yang diberikan kepada pedagang belum terintegrasi secara optimal, sehingga proses penguatan kapasitas belum berjalan menyeluruh. Di sisi lain, karakteristik pedagang yang beragam, terutama pedagang senior yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program digitalisasi pasar. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa beberapa dimensi pemberdayaan belum berjalan secara optimal, sehingga menghambat peningkatan kapasitas dan kemandirian pedagang di Pasar Tanah Abang.

Dalam hal upaya pemberdayaan pedagang pasar Tanah Abang oleh pemerintah disini penulis ingin melihat apakah praktik program pemberdayaan dari pemerintah sudah terealisasikan dengan baik atau belum. Pemberdayaan masyarakat adalah strategi yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi pedagang di Pasar Tanah Abang. Tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada pedagang melalui berbagai program, seperti pelatihan manajemen usaha, program pasar digital (2021-2024), promosi dan program pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan pengembangan infrastruktur pasar yang lebih baik. Program-program

ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pedagang untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik daripada yang mereka miliki saat ini.

Karena status tanggap darurat bencana Covid-19 di DKI Jakarta, Surat Keputusan No. 361 Tahun 2020 dikeluarkan untuk penutupan pasar Tanah Abang pada 27 Maret 2020 (Sandi, 2020). Pasar Tanah Abang ditutup hingga waktu tertentu. Ini dilakukan karena kasus COVID-19 terus meningkat, dengan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Sejak Pasar Tanah Abang ditutup, banyak pedagang yang mengeluhkan nasib mereka karena tidak dapat melakukan jual beli, yang mengakibatkan banyak dari mereka yang tidak dapat memperoleh penghasilan. Menurut (CNN Indonesia, 2020), pasar Tanah Abang telah mengalami kerugian paling sedikit sebesar Rp 4,5 triliun sejak penutupan. Jumlah kerugian ini sangat besar untuk pasar yang berfungsi sebagai pusat grosir tekstil di Indonesia. Karena tutupnya pasar Tanah Abang, situasi ekonomi ritel nasional juga terpengaruh. Hal ini disebabkan oleh penurunan perputaran uang di pasar Tanah Abang, yang mencapai Rp 200 milyar per hari, yang jelas berdampak pada perekonomian nasional (CNN Indonesia, 2020).

Pemerintah meluncurkan program go digital pada tahun 2021 beserta berbagai inisiatif pemberdayaan lainnya untuk membantu pedagang kecil bertahan selama pandemi, seperti bantuan permodalan, pendampingan usaha, serta pelatihan kemampuan digital. Meski demikian, kesenjangan digital masih menjadi tantangan, terutama bagi pedagang senior yang mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi dan beradaptasi dengan platform perdagangan online. Sebelum pandemi, pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan permodalan yang turut

mendorong kemandirian pedagang kecil di Pasar Tanah Abang. Kondisi ini sempat membuat pedagang mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lebih besar karena tingginya permintaan dan aktivitas perdagangan.

Setelah pandemi pemerintah melanjutkan berbagai bentuk dukungan, termasuk modal usaha, subsidi sewa, serta pelatihan digital. Akan tetapi pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sosialisasi, kurangnya pendampingan teknis, serta akses informasi yang belum merata bagi pedagang. Selain hambatan tersebut, dukungan pendampingan dan bantuan peningkatan kapasitas yang diberikan berbagai pihak masih belum terintegrasi dengan baik, sehingga proses pemberdayaan belum dirasakan merata oleh seluruh pedagang, sehingga tidak semua pedagang memperoleh manfaat dari program yang dijalankan. Berbagai kendala tersebut mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan masih memerlukan penguatan pada aspek dukungan, peningkatan kapasitas, dan penciptaan kondisi yang lebih kondusif bagi pedagang Pasar Tanah Abang.

Permasalahan tersebut menggambarkan bahwa beberapa aspek pemberdayaan, terutama dalam hal kemudahan akses informasi, penguatan kapasitas pedagang, dan penyediaan dukungan yang memadai, masih belum berjalan optimal sehingga perlu dianalisis lebih mendalam. Keberhasilan proses pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan dukungan yang memadai, meningkatkan kapasitas pedagang, serta memastikan akses informasi berjalan dengan baik. Di Pasar Tanah Abang, koneksi antara pemerintah daerah, PD Pasar Jaya, dan para pedagang sangat dibutuhkan

dalam memperkuat proses pemberdayaan sehingga para pedagang memperoleh dukungan yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk meneliti bagaimana pemerintah dalam memberdayakan pedagang Pasar Tanah Abang serta sejauh mana program yang dijalankan dapat menjawab permasalahan yang ada setelah pandemi. Pemberdayaan pedagang merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses informasi, peningkatan kapasitas usaha, dan dukungan untuk keberlangsungan usaha pedagang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat kondisi pedagang sebagai kelompok sasaran, tetapi juga mengkaji peran pemerintah dalam merancang dan melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan bagi pedagang Pasar Tanah Abang. Penelitian ini berfokus pada analisis upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui indikator teori pemberdayaan Sumodiningrat, yaitu *enabling* (terciptanya kondisi yang mendukung), *empowering* (peningkatan kapasitas individu atau masyarakat), dan *protecting* (perlindungan usaha). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai analisis upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang Pasar Tanah Abang pada periode 2023–2025.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberdayakan pedagang pasar Tanah Abang pada tahun 2023-2025?
2. Bagaimana perubahan kondisi usaha pedagang Pasar Tanah Abang setelah adanya program pemberdayaan pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang Pasar Tanah Abang pasca pandemi 2023-2025.
2. Menganalisis perubahan kapasitas usaha dan kondisi kesejahteraan ekonomi pedagang sebagai hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keberdayaan pelaku usaha di Pasar Tanah Abang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks pelaksanaan program pemerintah untuk mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat pasca pandemi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya mengenai penguatan program pemberdayaan agar lebih mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh pedagang Pasar Tanah Abang.
2. Menjadi masukan bagi pengelola pasar dan organisasi pedagang dalam meningkatkan dukungan, pendampingan, serta keterlibatan pedagang dalam berbagai kegiatan pemberdayaan.
3. Memberikan informasi bagi pedagang Pasar Tanah Abang mengenai pentingnya pemanfaatan program pemberdayaan, terutama pada aspek digitalisasi dan peningkatan kapasitas usaha, sehingga dapat mendukung kemandirian dan keberlanjutan ekonomi mereka.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Rohaetin, 2019, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Palangka Raya.	Pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling	Hasil penelitian adalah mereka berdagang pada malam hari sampai tengah malam. Pada bulan puasa mereka berdagang sampai waktu sahur. Mereka difasilitasi lampu listrik dan ditarik pajak retribusi setiap malamnya. Berjualan di luar lokasi yang telah ditentukan dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima melalui berbagai regulasi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek yang di berdayakan, penelitian diatas objeknya pedagang kaki lima sedangkan penelitian ini objek yang di berdayakan yaitu pedagang toko atau pedagang grosiran.
2.	Rahmah, 2018, Pemberdayaan Pedagang di Pasar Tradisional Maricaya Kota Makassar.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kewenangan kepada pedagang telah dilakukan dengan pemamfaatan fasilitas pasar dan pemberian tempat usaha yang bersih dan aman namun masih terdapat beberapa pengguna pasar yang tidak memanfaatkan dengan baik fasilitas yang ada sedangkan dari segi keamanan dan kebersihannya sudah semakin baik.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama memfokuskan penelitian di pemberdayaan pedagang pasar, sedangkan perbedaannya ialah lokasi penelitian yang dimana penelitian diatas berlokasi di pasar tradisional Maricaya Kota Makassar sedangkan penelitian penulis berlokasi di pasar Tanah Abang Jakarta.
3.	Fauziah, Putu Nomy Yasintha, I Ketut Winaya, 2021, Strategi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat	Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori manajemen strategis dari Wheelen and Hunger dengan 4 indikator yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi,	Jembatan Penyeberangan Serbaguna Tanah Abang belum maksimal dalam mengatasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, rendahnya sumber daya manusia, rendahnya kesadaran pedagang dan masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis yaitu dari teori yang digunakan yaitu menggunakan teori manajemen strategis sedangkan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat oleh

No	Nama, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		evaluasi dan pengendalian.		Sumodiningrat (1999). Penelitian diatas sama-sama membahas pemberdayaan pedagang, tetapi objeknya yang berbeda penelitian diatas pedagang kaki lima sebagai objeknya sedangkan penelitian ini pedagang toko yang menjadi objeknya.
4.	Nindya Putri Ginasari, 2022, Pemberdayaan Pedagang Pasar Tugu Baleendah di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Pemberdayaan Pedagang Pasar Tugu Baleendah ini sudah berjalan dengan cukup baik, program Baleendah Bedas Ekonomi yang digunakan sebagai program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta usaha, mampu memberdayakan pelaku usaha dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, serta lapak berdagang di Pasar Tugu Baleendah.	Penelitian ini menggunakan Teori Mardikanto yang mencakup empat bina yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan dengan subindikatornya dimanfaatkan untuk menjadi tolak ukur pemberdayaan masyarakat dan pedagang pasar. Meskipun penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama tentang pemberdayaan pedagang, tetapi teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas.
5.	Theresa Mega Moku, Herman Nayoan, Stefanus Sampe, 2021, Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.	Hasil penelitian di temukan bahwa perlu adanya peran dari masyarakat yang ada, baik dari pedagang ataupun dari pengunjung pasar ini, karena pemerintah juga dalam pengembangan pasar ini perlu sumbangsi pemikiran dari masyarakat agar supaya ada inovasi untuk pengembangan pasar ini, karena tujuan dari pemberdayaan pasar tradisional yang ada di	Penelitian ini berfokus pada penelitian yang menurut Mardiasmo (2004 : 18) sedangkan penelitian penulis berfokus pada teori pemberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1999) untuk menganalisis upaya pemerintah pasca pandemi. Lokus penelitian juga berbeda yaitu penelitian penulis

No	Nama, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			Langowan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langowan. Dalam hal ini pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, jika dilihat dari pemberdayaan pasar Langowan Timur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada, pemerintah tentunya harus melakukan pengembangan pada pasar ini, karena kegiatan ekonomi masyarakat Langowan berada pada pasar ini, jika pemerintah tidak melakukan pengembangan pada pasar ini, artinya pemerintah tidak mengutamakan kepentingan masyarakat yang bergantung hidup di pasar ini.	bertempat di Pasar Tanah Abang sedangkan lokus penelitian ini berada di Pasar Langowan Timur.

Sumber : Diolah Penulis, 2025

Pada tabel diatas menunjukkan penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk topik penelitian, sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan untuk mendukung kekuatan penelitian penulis. Penulis menguraikan beberapa perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam fokus penelitian mengenai pemberdayaan, teori yang digunakan, metode yang digunakan, terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Misalnya, lokus penelitian ini dilakukan di Pasar Tanah Abang di Jakarta, berfokus pada upaya pemerintah untuk memberdayakan pedagang di pasar Tanah Abang.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Sumodiningrat

Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, berpartisipasi dalam pembangunan, serta membuat keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Dalam pandangannya, pemberdayaan diposisikan sebagai strategi pemerintah untuk memperkuat kelompok ekonomi lemah sehingga mereka dapat bertahan dan bersaing di tengah perubahan sosial maupun ekonomi. Pemerintah berkewajiban menciptakan lingkungan yang mendukung, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk kerentanan yang dapat melemahkan posisi mereka (Sumodiningrat, 1999).

Sebagai bagian dari pendekatan dalam pembangunan masyarakat, pemberdayaan menurut Sumodiningrat berorientasi pada penguatan potensi, kemandirian, dan keberlanjutan usaha. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai pengarah, fasilitator, dan pelindung. Sumodiningrat (1999) menekankan bahwa pemberdayaan perlu diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat secara menyeluruh agar mereka mampu menangkap peluang ekonomi, menyelesaikan persoalan, serta menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan.

Dalam pandangan Sumodiningrat, terdapat tiga fungsi utama dalam proses pemberdayaan yang menjadi dasar untuk memahami peran pemerintah, khususnya dalam mendukung kelompok masyarakat kecil seperti pedagang di pasar

tradisional. Ketiga fungsi tersebut meliputi *enabling*, *empowering*, dan *protecting*, di mana masing-masing memiliki kontribusi penting dalam mendorong terciptanya masyarakat yang berdaya (Sumodiningrat, 1999). Pada penelitian ini, ketiga fungsi tersebut dimanfaatkan sebagai kerangka analisis untuk menilai bagaimana pemerintah memberdayakan pedagang Pasar Tanah Abang pada masa pemulihan pascapandemi.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana ketiga fungsi tersebut bekerja dalam proses pemberdayaan, berikut penjelasan masing-masing fungsi menurut Sumodiningrat:

1. *Enabling* (Menciptakan Kondisi yang Mendukung)

Fungsi *enabling* menurut Sumodiningrat dijelaskan sebagai peran pemerintah dalam membangun kondisi yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan aktivitas ekonominya. Fungsi ini meliputi penyediaan peluang, akses terhadap informasi, fasilitas pendukung, regulasi yang mempermudah, serta terciptanya lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif. Dalam kerangka tersebut, pemerintah berperan membuka ruang agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan yang dimiliki (Sumodiningrat, 1999).

2. *Empowering* (Peningkatan Kapasitas Masyarakat)

Menurut Sumodiningrat, *empowering* merupakan salah satu fungsi utama dalam proses pemberdayaan yang menekankan peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai bentuk pelatihan, pendidikan, penyediaan modal, pendampingan teknis, serta dukungan lain yang memungkinkan mereka mampu bertindak secara

mandiri dan mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan sendiri. Fungsi ini berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang telah dibuka melalui fungsi *enabling*, sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan memperkuat posisi ekonominya (Sumodiningrat, 1999).

3. *Protecting* (Perlindungan terhadap Kerentanan)

Fungsi *protecting* sebagaimana dijelaskan oleh Sumodiningrat merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah masyarakat semakin rentan akibat tekanan ekonomi, persaingan pasar, maupun dinamika sosial yang tidak stabil. Melalui fungsi ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kelompok masyarakat kecil memperoleh jaminan keamanan dalam berusaha, dukungan kebijakan, serta perlindungan ketika mereka menghadapi krisis atau potensi kerugian yang besar. Fungsi *protecting* menjadi penting agar masyarakat tetap mampu mempertahankan kegiatan ekonominya meskipun berada dalam situasi yang penuh risiko (Sumodiningrat, 1999).

Selain itu, ketiga fungsi pemberdayaan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam proses membangun masyarakat yang mandiri. *Enabling* berperan membuka akses dan peluang sehingga masyarakat memiliki fondasi awal untuk berkembang. *Empowering* kemudian memperkuat kemampuan mereka melalui peningkatan kapasitas yang bersifat teknis maupun non-teknis. Sementara itu, *protecting* memastikan bahwa masyarakat tidak kembali terpuruk akibat risiko sosial maupun ekonomi yang dapat melemahkan hasil pemberdayaan. Hubungan yang saling berkesinambungan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada tersedianya bantuan atau peluang,

tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut serta keberadaan sistem perlindungan yang menjaga keberlanjutan upaya pemberdayaan.

Menurut Sumodiningrat (1999), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mengambil keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Tujuan ini diwujudkan melalui upaya menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan masyarakat (*enabling*), memperkuat kemampuan dan keterampilan mereka agar dapat memanfaatkan peluang yang ada (*empowering*), serta memberikan perlindungan sehingga kelompok ekonomi lemah tidak semakin tersisih akibat tekanan sosial ataupun ekonomi (*protecting*). Dengan demikian, pemberdayaan diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, mampu mengelola usahanya, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat menghambat kesejahteraan mereka.

Teori pemberdayaan masyarakat Sumodiningrat relevan digunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian tidak hanya melihat keberadaan program pemberdayaan yang diberikan pemerintah kepada pedagang Pasar Tanah Abang, tetapi juga menilai bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan kondisi yang mendukung usaha pedagang, meningkatkan kapasitas mereka, serta memberikan perlindungan dalam menghadapi berbagai tantangan pascapandemi. Melalui indikator *enabling*, *empowering*, dan *protecting*, teori ini mampu menjelaskan secara komprehensif proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah serta

mengidentifikasi sejauh mana upaya tersebut telah mendukung pemulihan dan penguatan usaha pedagang. Oleh karena itu, teori Sumodiningrat digunakan sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang Pasar Tanah Abang pada tahun 2023-2025.

1.6.2 Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, membuka kesempatan, dan memberikan kekuatan kepada individu atau kelompok agar mereka dapat mengelola usaha, membuat keputusan, dan bertindak secara mandiri (Zuliyah, 2010). Pemberdayaan berarti memberikan dukungan yang membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, akses permodalan, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan dipahami sebagai rangkaian dukungan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta memperluas berbagai akses yang mereka butuhkan, sehingga proses tersebut dapat mendorong terwujudnya kemandirian yang berkelanjutan dalam kehidupan mereka (Sumodiningrat, 1999).

Menurut Robert Chambers, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pendekatan pembangunan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses perubahan, sehingga arah pembangunan berlandaskan pada nilai-nilai komunitas dan prinsip *people-centered*, *participatory*, *empowerment*, dan *sustainability*. Chambers menegaskan

bahwa pemberdayaan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga pada pencarian alternatif pertumbuhan ekonomi lokal yang memungkinkan masyarakat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Konsep ini mencakup gagasan *community development* sebagai proses membangun kapasitas sosial masyarakat, serta *community-based development* yang menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama kegiatan pembangunan. Tahap berikutnya berkembang konsep *community-driven development*, yaitu pendekatan pembangunan yang dirancang, digerakkan, dan diarahkan oleh masyarakat sendiri agar perubahan yang terjadi benar-benar berakar dari kebutuhan, kapasitas, dan aspirasi lokal.

Makna pemberdayaan merujuk pada upaya meningkatkan kapasitas atau memperkuat kemampuan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Istilah ini juga dipahami sebagai proses memanfaatkan sumber daya agar memberikan manfaat yang lebih besar daripada potensi awal yang dimiliki. Pemberdayaan adalah proses penyadaran masyarakat yang berlangsung secara transformatif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui penguatan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan dasar yang mereka hadapi serta mendorong tercapainya kondisi hidup yang sesuai dengan harapan (Muslim, 2009).

Pakpahan (2024) dalam buku Konsep Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses yang bertujuan memperkuat wawasan, sikap, keterampilan, serta kemampuan teknis

individu agar mereka dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki melalui berbagai program, kebijakan, dan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan pedagang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan praktis, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir, pengambilan keputusan, serta kemandirian dalam mengelola usaha (Pakpahan *et al.*, 2024).

Zubaedi (2007) memandang pemberdayaan sebagai proses yang membantu masyarakat mengidentifikasi potensi diri, mengembangkan kapasitas, serta mengatasi hambatan yang menghalangi pencapaian kesejahteraan sosial. Proses pemberdayaan berlangsung secara bertahap, mulai dari peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas, hingga tercapainya tingkat kemandirian yang berkelanjutan. Pemberdayaan juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan (Zubaedi, 2007). Di sisi pemerintah pemberdayaan tidak hanya sebatas memberikan bantuan langsung, tetapi juga mencakup upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan usaha. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan akses pelatihan, digitalisasi pasar, perbaikan fasilitas, serta program pendampingan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan pengarah agar pedagang dapat mengembangkan kemampuan dan menjaga keberlangsungan usahanya.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan menjadikan individu maupun kelompok lebih

berdaya, mandiri, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang mereka miliki.

b. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola kehidupan sosial dan ekonomi secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan, tetapi juga menyangkut pembentukan kesadaran kritis, rasa percaya diri, serta kemampuan mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Menurut Chambers, proses pemberdayaan menekankan bahwa masyarakat harus diposisikan sebagai “*local people as analysts*”, yaitu pihak yang paling memahami kondisi mereka sendiri dan berhak menentukan arah tindakan pembangunan (Chambers, 1994). Dengan demikian, pemberdayaan tidak dapat dipaksakan secara top-down, tetapi harus tumbuh dari partisipasi dan kebutuhan masyarakat.

Tahap awal dalam proses pemberdayaan dimulai dari kegiatan identifikasi dan pengkajian kondisi masyarakat. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap potensi, permasalahan, serta peluang yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat. Tahap pengkajian ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai situasi yang dihadapi serta menguatkan kemampuan mereka untuk menganalisis kebutuhan secara mandiri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *reversal of learning* dari Chambers, yaitu perubahan pola pikir di mana pemerintah atau pendamping tidak

mendikte masyarakat, tetapi justru belajar dari perspektif mereka (Chambers, 1994). Prinsip ini memastikan bahwa proses pengkajian dilakukan secara lebih sensitif terhadap realitas lokal.

Tahap selanjutnya adalah proses perencanaan partisipatif, yakni penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil pengkajian sebelumnya. Pada tahap ini masyarakat dilibatkan dalam merumuskan prioritas masalah, menentukan alternatif solusi, serta mengorganisasi sumber daya yang dimiliki. Soekanto (1987) dalam (Maryani & Nainggolan, 2019) menyatakan bahwa tahap perencanaan harus dilakukan melalui diskusi kelompok agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemahaman bersama serta membangun rasa kepemilikan terhadap program. Chambers juga menegaskan pentingnya *participatory decision-making*, yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat secara aktif sehingga mereka tidak sekadar menjadi penerima manfaat, melainkan pelaku utama perubahan (Chambers, 1994).

Setelah rencana ditetapkan, proses pemberdayaan berlanjut pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat menjalankan kegiatan yang telah disepakati dengan pendampingan fasilitator apabila diperlukan. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada pencapaian teknis, tetapi juga membangun kerja sama, komitmen, dan kedisiplinan kelompok. Mardikanto (2013) dalam (Ginting *et al.*, 2022) menekankan bahwa dalam proses ini penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui pengalaman langsung, karena pemberdayaan terjadi ketika masyarakat

berlatih memecahkan masalah secara mandiri. Pelaksanaan juga harus adaptif terhadap situasi lapangan, sehingga keaktifan dan kreativitas masyarakat menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan yang muncul.

Tahap berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana kegiatan berjalan sesuai tujuan serta untuk mengetahui kendala yang muncul. Menurut Soekanto (1987), evaluasi harus dilakukan secara partisipatif agar masyarakat dapat menilai sendiri keberhasilan dan kelemahan program, serta merumuskan perbaikan. Prinsip evaluasi partisipatif ini sejalan dengan pandangan Chambers bahwa pemberdayaan yang efektif adalah proses yang menghasilkan *self-critical awareness* atau kesadaran reflektif dalam diri masyarakat. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mampu menilai, memperbaiki, dan mengembangkan program secara mandiri.

c. Tujuan Pemberdayaan

Payne (2001) dalam (Saleh, 2020), menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan sosial agar memperoleh kekuatan, keberdayaan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan serta menentukan tindakan yang berkaitan dengan hidup mereka. Payne menekankan bahwa pemberdayaan berupaya mengurangi berbagai batasan pribadi maupun sosial yang dapat menghambat kapasitas seseorang. Pemberdayaan pada dasarnya ditujukan untuk membentuk masyarakat yang mampu mengelola pikirannya,

mengendalikan tindakannya, serta menentukan arah hidupnya melalui proses kemandirian yang terus berkembang.

Menurut Keban (1999) dalam (Fitrianiesti, 2020), pemberdayaan diarahkan untuk membentuk individu maupun kelompok masyarakat agar mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Kemandirian yang dimaksud mencakup kemampuan untuk berpikir secara rasional, bertindak secara sadar, dan mengandalkan kemampuan internal dalam menghadapi berbagai persoalan. Kondisi masyarakat yang mandiri tercermin dari kesanggupan mereka untuk merumuskan gagasan, menentukan pilihan, serta melaksanakan tindakan yang dianggap tepat guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di lingkungannya.

Mardikanto (2013) dalam (Ginting *et al.*, 2022), menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat mencakup serangkaian perbaikan yang berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan. Pertama, pemberdayaan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan (*better institution*), yaitu melalui peningkatan kualitas aktivitas dan tindakan yang dapat mendorong terbentuknya jaringan kemitraan yang lebih kuat. Kedua, pemberdayaan bertujuan meningkatkan mutu usaha (*better business*), yang muncul sebagai hasil dari meningkatnya akses, semangat belajar, serta kemampuan kelembagaan masyarakat. Ketiga, perbaikan usaha diharapkan bermuara pada peningkatan pendapatan (*better income*), baik pada tingkat individu, keluarga maupun komunitas. Keempat, peningkatan pendapatan tersebut

selanjutnya diharapkan berkontribusi pada membaiknya kondisi lingkungan fisik dan sosial (*better environment*), mengingat kerusakan lingkungan kerap berkaitan dengan keterbatasan ekonomi. Kelima, kondisi lingkungan yang lebih baik diharapkan mampu mendorong terciptanya kualitas hidup yang lebih layak (*better living*) bagi keluarga dan masyarakat. Keenam, seluruh proses tersebut pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih positif, yaitu terbentuknya masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera (*better community*).

Tujuan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dipandang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu mengukur perubahan yang terjadi setelah program pemberdayaan dilaksanakan. Berbeda dengan teori pemberdayaan yang berfokus pada proses pelaksanaan program, Mardikanto menekankan pada hasil atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai indikator peningkatan kondisi usaha, pendapatan, lingkungan, hubungan sosial, dan kelembagaan. Konsep tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini yang tidak hanya ingin mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga menilai dampak yang ditimbulkan kepada pedagang Pasar Tanah Abang pada tahun 2023-2025. Kondisi pemulihan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan usaha pedagang sebagai kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, teori tujuan pemberdayaan Mardikanto digunakan karena mampu membantu

memahami berbagai perubahan yang muncul dalam aktivitas usaha, kondisi lingkungan usaha, hubungan sosial antar pedagang, serta dukungan kelembagaan yang mereka rasakan setelah adanya upaya pemberdayaan. Teori ini tidak hanya melihat keberadaan program pemberdayaan, tetapi juga membantu menjelaskan bagaimana perubahan tersebut hadir dalam pengalaman dan praktik usaha pedagang Pasar Tanah Abang.

d. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Soekanto (1987) dalam (Maryani & Nainggolan, 2019), proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari tujuh tahapan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (*Engagement*)

Tahap awal meliputi penyiapan petugas pemberdayaan serta penyiapan lapangan. Petugas yang kompeten dibutuhkan untuk memastikan program berjalan efektif, sementara penyiapan lapangan dilakukan secara non-direktif agar sesuai dengan kondisi masyarakat.

2. Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan, masalah, dan potensi masyarakat. Petugas mengkaji *felt needs* dan sumber daya lokal agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

3. Tahap Perumusan Alternatif Kegiatan

Masyarakat diajak secara partisipatif untuk menganalisis masalah dan merumuskan berbagai pilihan program. Setiap alternatif dipertimbangkan

kelebihan dan kekurangannya agar dapat dipilih kegiatan yang paling efektif.

4. Tahap Pemformalisasian Rencana Aksi

Masyarakat bersama petugas menyusun rencana kegiatan secara lebih terstruktur, termasuk menuangkannya ke dalam bentuk tertulis seperti proposal. Tujuannya agar program jelas, terarah, dan mudah dipahami oleh pihak pendukung.

5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi)

Program pemberdayaan dilaksanakan dengan melibatkan kader masyarakat untuk menjaga keberlanjutan. Sosialisasi dilakukan terlebih dahulu agar peserta memahami tujuan dan proses pelaksanaan sehingga mengurangi hambatan di lapangan.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara bersama antara masyarakat dan petugas untuk menilai capaian program, mengidentifikasi kendala, dan menyusun perbaikan. Evaluasi juga berfungsi membangun sistem pengawasan internal dalam komunitas.

7. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan penghentian formal program ketika masyarakat dinilai telah mampu mandiri. Program dianggap berhasil apabila komunitas telah dapat mengelola kehidupan dan mengatasi persoalannya tanpa ketergantungan pada pihak luar.

1.7 Operasionalisasi Konsep

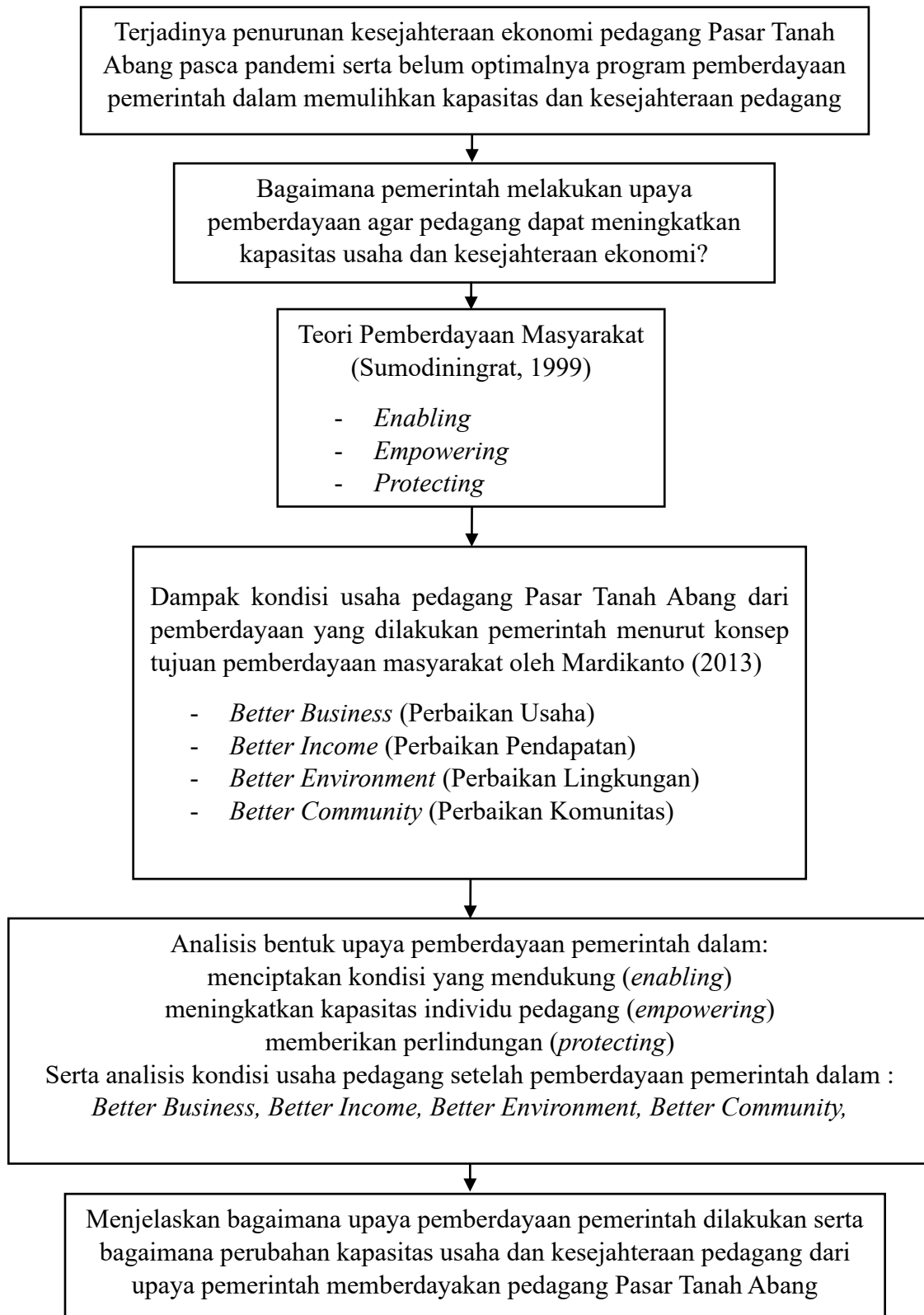
Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

Teori	Dimensi	Indikator	Sub Indikator
Teori Pemberdayaan Masyarakat (Sumodiningrat, 1999)	1. <i>Enabling</i>	Akses Informasi	<ul style="list-style-type: none"> – informasi kebijakan mudah diperoleh – informasi peluang usaha terbuka – akses informasi pelatihan meningkat
		Fasilitas dan Sarana Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> – ketersediaan fasilitas usaha dasar – sarana pelatihan tersedia – dukungan infrastruktur untuk kegiatan ekonomi
		Regulasi yang Mempermudah	<ul style="list-style-type: none"> – penyederhanaan administrasi – perizinan usaha lebih mudah – pelayanan publik mendukung aktivitas ekonomi
		Lingkungan Sosial Ekonomi yang Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> – peluang usaha lebih terbuka – kondisi pasar mendukung pemulihan usaha – hambatan struktural menurun
	2. <i>Empowering</i>	Pelatihan dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> – pelatihan peningkatan keterampilan usaha – pelatihan manajemen sederhana – pelatihan digital/daring
		Pendampingan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> – pendampingan operasional usaha – bimbingan manajerial – konsultasi strategi usaha
		Akses Sumber Daya (Modal dan Sarana)	<ul style="list-style-type: none"> – bantuan modal usaha tersedia – akses pembiayaan mudah – sarana pendukung usaha diberikan
		Penguatan Kapasitas Personal	<ul style="list-style-type: none"> – kemampuan mengambil keputusan meningkat – kepercayaan diri dalam usaha naik – kemampuan adaptasi pasca pandemi membaik
	3. <i>Protecting</i>	Perlindungan dari Risiko Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> – mitigasi kerugian usaha – stabilisasi pendapatan – perlindungan dari gejolak pasar
		Perlindungan dari Persaingan Tidak Sehat	<ul style="list-style-type: none"> – pengawasan praktik pasar – perlindungan usaha kecil – kebijakan pengendalian persaingan
		Jaminan Keamanan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> – bantuan saat krisis – subsidi atau keringanan biaya – kebijakan menjaga stabilitas usaha
		Perlindungan Sosial dan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> – jaring pengaman sosial – dukungan bagi pelaku usaha rentan

Teori	Dimensi	Indikator	Sub Indikator
			<ul style="list-style-type: none"> – intervensi pemerintah saat ketidakstabilan sosial
Tujuan Pemberdayaan Masyarakat (Mardikanto, 2013)	1. <i>Better Bussines</i> (Perbaikan Usaha)	<ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan keterampilan mengelola usaha – Akses ke pasar dan pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> – kemampuan pedagang mengelola stok & pemasaran meningkat – kemampuan menggunakan teknologi/digital marketing bertambah – akses pedagang ke pasar <i>online</i> lebih terbuka
	2. <i>Better Income</i> (Perbaikan Pendapatan)	<ul style="list-style-type: none"> – Kenaikan pendapatan setelah intervensi – Stabilitas pendapatan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> – pendapatan pedagang lebih stabil dibanding masa pandemi – peningkatan transaksi atau omzet harian/bulanan – diversifikasi produk yang meningkatkan pendapatan
	3. <i>Better Environment</i> (Perbaikan Lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> – Perbaikan lingkungan usaha – Perbaikan relasi sosial dalam lingkungan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> – kondisi tempat usaha lebih tertata pascapandemi – interaksi sosial antar-pedagang dan dengan konsumen lebih kondusif – lingkungan pasar lebih bersih dan mendukung aktivitas usaha
	4. <i>Better Community</i> (Perbaikan Komunitas)	<ul style="list-style-type: none"> – Kemandirian komunitas – Penguatan solidaritas sosial 	<ul style="list-style-type: none"> – komunitas pedagang lebih mandiri dalam mengelola kegiatan/masalah usaha – solidaritas antar pedagang meningkat (saling membantu dalam pemulihan usaha) – munculnya inisiatif kolektif untuk memperbaiki kondisi pasar

Sumber : Diolah Penulis, 2026

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Nasution, 2023). Metode penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan teknik pengumpulan data, tetapi juga mencakup desain penelitian, prosedur, dan cara-cara untuk menginterpretasi hasil yang ditemukan. Metode penelitian yang dipilih sangat bergantung pada jenis dan tujuan penelitian itu sendiri. Metode penelitian memainkan peran penting dalam memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, peneliti dapat memberikan kontribusi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterapkan untuk situasi lain.

1.9.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Metode kualitatif ini dirancang untuk memahami makna-makna secara mendalam. Penulis memilih pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif karena fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pemahaman serta penjelasan yang mendalam mengenai realitas atau fakta yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha di pasar Tanah Abang.

Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah suatu desain penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan deskripsi yang disampaikan dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, dalam konteks yang alami dan spesifik, serta memanfaatkan berbagai metode yang bersifat alami.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang Pasar Tanah Abang melalui perspektif para informan yang terlibat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk menggambarkan pelaksanaan program pemberdayaan serta kondisi usaha pedagang setelah adanya upaya pemberdayaan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program pemberdayaan dan pengalaman yang dirasakan oleh para pedagang di Pasar Tanah Abang.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan tempat utama penelitian ini, dan dianggap tempat paling tepat untuk melakukan penggalan data secara mendalam tentang upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang Pasar Tanah Abang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pihak Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program

pemberdayaan pedagang, PD Pasar Jaya sebagai pengelola Pasar Tanah Abang yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program di lingkungan pasar, serta pedagang Pasar Tanah Abang sebagai penerima program pemberdayaan. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang, pelaksanaan program yang dijalankan, serta kondisi usaha pedagang setelah adanya program pemberdayaan.

1.9.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pedagang Pasar Tanah Abang, pengelola Pasar Tanah Abang, serta pihak Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat yang terlibat dalam program pemberdayaan pedagang. Selain itu, peneliti melakukan observasi terhadap kondisi pasar dan aktivitas pedagang, serta mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan. Data primer tersebut digunakan sebagai sumber utama untuk memahami upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang dan kondisi usaha pedagang Pasar Tanah Abang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi laporan dan

dokumen resmi PD Pasar Jaya, dokumen program pemberdayaan pedagang, dan data dari Suku Dinas PPKUKM Jakarta. Data sekunder digunakan untuk memperkuat pemahaman peneliti mengenai konsep pemberdayaan, kondisi pedagang pasar, serta program yang berkaitan dengan pemberdayaan pedagang. Selain itu, data tersebut juga menjadi bahan pendukung dalam menganalisis dan menginterpretasikan temuan penelitian di lapangan.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Teknik yang digunakan dalam proses ini sangat bergantung pada jenis informasi yang ingin digali. Berikut adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian, wawancara melibatkan dua pihak utama: pewawancara yang bertugas mengajukan pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan respons atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2009). Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, di mana terwawancara diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban secara bebas tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan pedagang Pasar Tanah Abang, Perumda Pasar Jaya sebagai pengelola Pasar Tanah Abang, serta pihak Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian, namun peneliti tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pendapatnya secara lebih luas. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program pemberdayaan pedagang, partisipasi pedagang dalam program, serta kondisi usaha pedagang setelah adanya upaya pemberdayaan.

2. Teknik Observasi

1. Pengamatan Langsung di Lokasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Pasar Tanah Abang untuk mengidentifikasi perilaku pedagang dan upaya pemberdayaan oleh pemerintah. Pengamatan dilakukan tanpa intervensi, dengan pencatatan yang sistematis terhadap aktivitas yang terjadi di lapangan, seperti program pelatihan, pemberian fasilitas, atau kebijakan terkait. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena yang sedang berlangsung dalam keadaan aslinya, tanpa ada pengaruh atau bias eksternal.

2. Observasi Berdasarkan Pengalaman Langsung

Teknik observasi dalam penelitian ini didasarkan pada pengalaman langsung peneliti terhadap fenomena sosial yang terjadi di Pasar Tanah

Abang. Peneliti mengamati interaksi antara pedagang dengan pemerintah dan program pemberdayaan yang diterapkan. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran mendalam dan kontekstual mengenai pemberdayaan pedagang secara langsung.

3. Pencatatan Peristiwa dalam Situasi Sebenarnya

Dalam pengamatan ini, peneliti mencatat setiap peristiwa atau kejadian yang relevan dengan tujuan penelitian, baik itu kejadian yang berkaitan dengan program pemberdayaan pemerintah maupun respons pedagang terhadap program tersebut. Pencatatan dilakukan secara detail untuk memastikan data yang diperoleh bersifat objektif dan sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Beberapa jenis dokumentasi yang digunakan meliputi:

1. Dokumen Tertulis

Peneliti mengumpulkan dokumen resmi terkait program pemerintah di Pasar Tanah Abang, seperti peraturan daerah, laporan kegiatan pemerintah, atau surat edaran yang berhubungan dengan pemberdayaan pedagang.

2. Foto

Dokumentasi visual berupa foto diambil untuk merekam kondisi pasar,

aktivitas pedagang, dan upaya pemberdayaan yang diterapkan oleh pemerintah.

3. Laporan Program Pemerintah

Peneliti mencari laporan atau evaluasi dari pemerintah terkait program pemberdayaan yang dilakukan di pasar.

Proses pengumpulan dokumentasi dilakukan dengan izin dari pihak terkait, baik itu pengelola pasar atau pedagang, untuk memastikan etika penelitian terjaga. Semua dokumentasi disimpan dengan baik dan digunakan sebagai referensi untuk memperkuat analisis data.

Dokumentasi ini berperan penting dalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap pemberdayaan pedagang di Pasar Tanah Abang.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu elemen penting dalam metodologi penelitian kualitatif, yang mencakup proses penyusunan, pengelompokan, dan penafsiran data yang telah dikumpulkan. Dalam analisis data kualitatif, biasanya dilakukan identifikasi tema utama, pengkodean data, pembuatan kategori, serta pencarian pola atau hubungan yang muncul dalam data (Rifa'i, 2023). Analisis data yang dilakukan bertujuan untuk menemukan solusi atau jawaban atas masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian (Rozali, 2022). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan bertujuan untuk memahami dampak kebijakan pemerintah

terhadap pemberdayaan pedagang di Pasar Tanah Abang secara mendalam dan sistematis. Beberapa teknik analisis data yang relevan antara lain:

1. Analisis Tematik

Analisis tematik merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti (Braun & Clarke, 2006 dalam Rozali, 2022). Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses pengorganisasian, kategorisasi, dan interpretasi data yang telah dikumpulkan (Rifa'i, 2023). Dalam penelitian ini, analisis tematik dilakukan dengan menelaah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan, kemudian mengelompokkan data berdasarkan kesamaan makna dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis untuk menemukan tema-tema yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang melalui dimensi *enabling*, *empowering*, dan *protecting*, serta kondisi usaha pedagang setelah adanya upaya pemberdayaan. Tema-tema yang telah diidentifikasi kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi dan penekanan fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan (Rijali, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai upaya

pemerintah dalam pemberdayaan pedagang Pasar Tanah Abang dan kondisi usaha pedagang setelah adanya upaya pemberdayaan. Data yang telah dipilih kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti *enabling*, *empowering*, *protecting*, serta perubahan kondisi usaha pedagang, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.

3. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah proses membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh menggunakan berbagai waktu dan alat yang berbeda (Rijali, 2018). Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu pedagang Pasar Tanah Abang, pengelola Pasar Tanah Abang, dan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Jakarta Pusat. Selain itu, peneliti juga membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Melalui proses tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih valid dan komprehensif mengenai upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang Pasar Tanah Abang.

Dengan menggunakan teknik-teknik analisis data ini, peneliti dapat menggali secara mendalam dan menyajikan temuan yang akurat tentang bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang di Pasar Tanah Abang.

1.9.7 Kualitas Data

Untuk menjamin kualitas data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merujuk pada proses pengujian data yang diperoleh dari berbagai sumber informan. Dengan melakukan triangulasi sumber, keandalan data dapat dipertajam, terutama apabila data yang dikumpulkan selama penelitian diperiksa melalui berbagai sumber atau informan (Sugiyono, 2017, 2016 dalam Alfansyur & Mariyani, 2020). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan Informasi dari Berbagai Informan

Peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari pedagang Pasar Tanah Abang, pengelola Pasar Tanah Abang, serta pihak Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat yang terlibat dalam program pemberdayaan pedagang. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui kesesuaian informasi mengenai pelaksanaan program pemberdayaan dan kondisi pedagang.

2. Membandingkan Hasil Wawancara dengan Dokumen Pendukung

Data yang diperoleh melalui wawancara dibandingkan dengan berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan, dokumentasi program, data dari PD Pasar Jaya, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pemberdayaan pedagang. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat keabsahan informasi yang diperoleh dari para informan.

3. Membandingkan Hasil Observasi dengan Hasil Wawancara

Peneliti membandingkan temuan observasi di lapangan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara kondisi yang diamati secara langsung dengan informasi yang disampaikan oleh informan.

Adapun triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pedagang Pasar Tanah Abang, pengelola Pasar Tanah Abang, dan pihak Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat. Selain itu, hasil wawancara dibandingkan dengan data dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, serta hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti.